

# Musabab Gagal Raih Adipura

PENGHARGAAN Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lepas dari genggaman Kota Depok pada tahun lalu. Musababnya, kota itu dinilai buruk dalam sistem pengelolaan sampah. Wali Kota Mohammad Idris realistis melihat kegagalan itu.

"Menaikkan poin 0,4 saja itu sudah sulit," ujarnya di tengah acara evaluasi tiga tahun pemerintahannya di kantornya, kemarin.

Dia mengakui Depok belum masif dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya sehingga poin pemberdayaan masyarakat jadi jeblok.

Pada 10 Februari lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan standar pengolahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Menurut dia, Kota Depok belum memenuhi standar itu sehingga gagal mendapatkan Piala Adipura pada 2018. Dia pun berjanji akan membina Kota Depok agar bisa meningkatkan kinerja di bidang lingkungan. "Paling tidak, tahun depan sudah rapi," ucapnya.

Siti Nurbaya merujuk pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayang yang masih menerapkan konsep *open dumping*. Artinya, 1.300 ton sampah yang datang tiap hari langsung ditumpuk tanpa diolah lebih dulu. "Itu tidak boleh menurut undang-undang."

Dia juga menjelaskan, persoalan di Cipayang menjadi faktor kedua gagalnya Depok meraih predikat kota bersih dan teduh. Faktor lainnya adalah gugatan warga di sekitar TPA Cipayang yang sampai ke pengadilan. Pemerintah Depok sampai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane mengenai tuntutan warga akibat longsoran sampah TPA Cipayang di Kali Pesanggrahan. Sampah yang menutupi saluran kali tersebut membuat banjir di sekitar jembatan Kelurahan Pasir Putih.

"Banjir bukan hanya karena longsoran sampah, tapi juga karena kali perlu dikeruk," tutur Siti.

Pengadilan Negeri Depok menggelar sidang perdana gugatan warga Kampung Pasir Putih terhadap Pemerintah Kota Depok ihwal polusi udara dampak TPA Cipayang pada 23 Agustus 2018. Kuasa hukum warga Pasir Putih, Achmad Faisal, berharap majelis hakim memutuskan secara adil.

"Harapan kami, warga dapat memperoleh hak-haknya dan kompensasi layak yang selama ini dilanggar Pemkot Depok," ujarnya.

Menurut Idris, dalam APBD tahun ini dianggarkan proyek pembangunan jembatan Pasir Putih serta pengerukan Kali Pesanggrahan. Dia juga membeberkan tumpukan sampah di sana mencapai 23 meter, melebihi batas maksimal 20 meter. Selain itu, tahun ini Depok membeli alat berat untuk mengalihkan sampah ke sumbu buangan (*landfill*) yang lama. "Tapi rencana ini diprotes warga," kata Wali Kota Idris.